

Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan PDRB Terhadap IPM di Propinsi-Provinsi Indonesia Tahun 2020-2024

Billy Fernando^{1*} dan Renta Yustie²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia

*e-mail : billyfernando06@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

8 December 2025

Revised :

12 December 2025

Accepted :

13 December 2025

Kata Kunci :

Belanja pendidikan, Belanja kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia.

Keywords :

Education expenditure, Health expenditure, Gross Regional Domestic Product, Human Development Index

Pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan disparitas signifikan antar wilayah meskipun terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional. Kenyataan ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan kualitas layanan dasar serta efektivitas alokasi belanja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh parsial dan simultan dari Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap IPM. Metode kuantitatif menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020 sampai 2024 diaplikasikan. Model regresi data panel digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel setelah melalui pengujian Chow dan Hausman. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Belanja Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini diinterpretasikan sebagai inefisiensi alokasi anggaran belanja pendidikan yang cenderung lebih banyak terserap pada belanja rutin dan administrasi dibandingkan investasi langsung pada peningkatan kualitas proses belajar. Belanja Kesehatan terbukti tidak memberikan pengaruh signifikan, yang mengisyaratkan adanya masalah tata kelola dalam implementasi program kesehatan di daerah. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap IPM. Berdasarkan temuan ini, diperlukan perumusan ulang kebijakan fiskal daerah agar alokasi Belanja Pendidikan dapat berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan sekadar peningkatan kuantitas anggaran, sekaligus peningkatan efektivitas belanja kesehatan.

The Influence of Education Expenditure, Health Expenditure, and GRDP on HDI in Indonesian Provinces for the Period 2020-2024

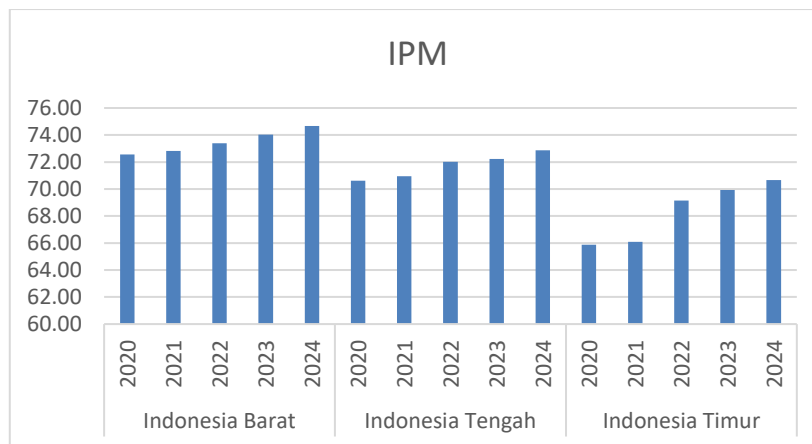
ABSTRACT

Human development in Indonesia exhibits significant disparities between regions despite a national increase in the Human Development Index (HDI). This fact indicates the uneven quality of basic services and challenges regarding the effectiveness of local government spending allocation, especially in the education and

health sectors. This research aims to analyze the partial and simultaneous influence of Education Spending, Health Spending, and Regional Gross Domestic Product (RGDP) on the HDI. A quantitative method using panel data from 34 Indonesian provinces covering the 2020 to 2024 period was applied. The panel data regression model was utilized to test the causal relationship between the variables after conducting the Chow and Hausman tests. The estimation results indicate that Education Spending has a negative and significant effect on the HDI. This finding is interpreted as inefficiency in the allocation of the education budget, which tends to be absorbed more by routine and administrative expenditures than by direct investment in improving the quality of the learning process. Health Spending was proven to have no significant influence, suggesting governance issues in the implementation of local health programs. Meanwhile, the Regional Gross Domestic Product (RGDP) was found to have a positive and significant effect on the HDI. Simultaneously, all three variables provide a significant contribution to the HDI. Based on these findings, a reformulation of local fiscal policy is required so that the allocation of Education Spending is oriented toward quality improvement, rather than merely increasing budget quantity, along with improving the effectiveness of health spending.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Gambar 1. Data Peningkatan IPM Indonesia berdasarkan Wilayah Indonesia 2020-2024

Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai provinsi Indonesia selama periode 2020–2024. Perbedaan ini tidak hanya menegaskan ketimpangan antar wilayah, tetapi juga menunjukkan variasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Gambar 1 memperlihatkan bahwa provinsi di Indonesia Barat secara umum

mencatat peningkatan stabil di kisaran 71–80, sementara sebagian besar provinsi di Indonesia Timur bergerak lebih lambat, berada di kisaran 60–70.

Pada tahun 2024, DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi sebesar 83,08, jauh melampaui Papua dengan 73,00 dan Nusa Tenggara Timur yang hanya mencapai 67,39. Selisih lebih dari sepuluh poin ini menunjukkan ketimpangan yang relatif konsisten sejak 2020. Provinsi berpendapatan tinggi seperti Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Timur mencatat kenaikan IPM lebih cepat, dengan angka di atas 77 pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan manusia cenderung terjadi di wilayah dengan kapasitas fiskal dan struktur ekonomi lebih kuat, sedangkan wilayah dengan basis ekonomi lemah masih menghadapi hambatan struktural meskipun tetap menunjukkan tren positif.

Periode 2020–2024 juga menampilkan dinamika kompleks karena pandemi COVID-19 mengubah prioritas belanja pemerintah daerah ke sektor sosial. Akibatnya, pertumbuhan IPM di beberapa provinsi berjalan lebih lambat, dan ketidakseimbangan ini menegaskan bahwa belanja daerah serta kapasitas ekonomi tetap menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Ketimpangan layanan dasar yang tidak segera diatasi berpotensi memicu migrasi internal, menurunkan produktivitas regional, dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Fenomena tersebut memberikan dasar kuat untuk melakukan kajian empiris mengenai determinan pembangunan manusia pada tingkat provinsi.

Belanja pendidikan dan belanja kesehatan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerangka ekonomi publik menempatkan kedua sektor ini sebagai bentuk investasi sosial yang penting. (Todaro & Smith, 2020) menjelaskan pembangunan manusia sebagai proses peningkatan kapabilitas dasar masyarakat. Dalam konteks ini, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat bergantung pada efektivitas layanan publik yang disediakan pemerintah, sehingga alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang optimal berpotensi meningkatkan pembangunan manusia, meskipun efektivitasnya berbeda antarwilayah sesuai kondisi fiskal dan struktur ekonomi daerah.

Pembangunan manusia merupakan proses esensial untuk memperluas kapabilitas individu agar dapat menjalani kehidupan yang produktif, bermakna, dan berkualitas. Perluasan kapabilitas ini bergantung pada akses merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar, karena ketiga elemen tersebut membentuk fondasi utama kualitas hidup masyarakat. Belanja pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang meningkatkan kualitas modal manusia, karena pendidikan memperluas pengetahuan, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi ketimpangan sosial melalui peningkatan keterampilan (UNDP, 2022).

(Badan Pusat Statistik, 2025) menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang paling berharga, sehingga pembangunan harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan penduduk menikmati hidup panjang, sehat, dan produktif. Pandangan ini selaras dengan konsep Sen, yang menempatkan kualitas manusia sebagai tujuan utama pembangunan. BPS mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk, diukur melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Penekanan pada dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak menunjukkan bahwa peningkatan IPM memerlukan perbaikan terpadu pada seluruh aspek kualitas hidup.

Belanja kesehatan dipandang sebagai investasi strategis yang meningkatkan kapasitas biologis dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen menegaskan bahwa modal manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, menjadi inti dari

proses pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Investasi di sektor ini meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus menciptakan eksternalitas positif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Belanja publik di bidang pendidikan dan kesehatan membantu mengatasi kegagalan pasar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis modal manusia.

Namun, besarnya belanja publik tidak menjamin peningkatan IPM secara otomatis. Keberhasilan belanja sangat bergantung pada kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas institusi publik (UNDP, 2024). Tantangan struktural seperti korupsi atau rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dapat mengurangi dampak belanja pemerintah terhadap kualitas hidup. Oleh karena itu, efektivitas alokasi belanja pendidikan dan kesehatan harus dianalisis secara komprehensif untuk memastikan kontribusi optimal terhadap pembangunan manusia.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan pembangunan manusia menunjukkan hasil yang beragam dan terkadang kontradiktif, sehingga kajian lebih lanjut menjadi penting. (Siregar et al., 2023) menemukan bahwa belanja pendidikan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sementara belanja kesehatan memberikan pengaruh positif signifikan di Provinsi Aceh. Sebaliknya, (Amelia & Arisetyawan, 2024) melaporkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Jawa Timur, menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik dapat berbeda antarwilayah. Hasil serupa diperoleh (C. L. Pratama & Sumiyarti, 2023) di Jawa Barat, di mana belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, menegaskan bahwa kondisi ekonomi regional menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Firmansyah & Wasil, 2024) di Indonesia Timur mengonfirmasi pengaruh positif signifikan dari belanja pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Penelitian lain, seperti (C. L. Pratama & Mandai, 2023) di Jawa Barat dan (Banase & Purwono, 2024) di Nusa Tenggara Timur, juga menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan secara konsisten berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Kajian mutakhir semakin memperkuat kompleksitas hubungan ini. (Harsono et al., 2024) di Nusa Tenggara Barat membuktikan bahwa belanja kesehatan berdampak positif signifikan terhadap IPM, sementara belanja pendidikan hanya menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan. (Nadhi et al., 2025) di wilayah Sumba menemukan pengaruh positif signifikan dari pengeluaran pendidikan dan kesehatan terhadap IPM, menegaskan relevansi kerangka teori modal manusia dan pentingnya komitmen fiskal pemerintah daerah. Namun, (M. I. Pratama & Nursari, 2025) di Lampung melaporkan pengaruh negatif belanja pendidikan dan pengaruh tidak signifikan kemiskinan terhadap IPM, menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran dan karakteristik daerah memengaruhi hubungan antar variabel.

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap menjadi faktor determinan yang konsisten. (Hidayat & Perwithosuci, 2024) di Jawa Barat menegaskan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM, menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah menjadi penentu penting dalam penyediaan layanan publik. Perspektif efisiensi anggaran juga diperkuat (Kurniawan & Murtala, 2021), yang menemukan bahwa hanya 14 dari 34 provinsi beroperasi pada batas efisiensi pada periode 2014–2018. Temuan ini menyiratkan bahwa ketidakefisienan belanja publik merupakan masalah sistemik yang perlu perhatian serius dalam perencanaan fiskal.

Studi komparatif di lima negara ASEAN menunjukkan pengaruh positif signifikan belanja pendidikan terhadap IPM, namun belanja kesehatan positif tetapi tidak signifikan secara statistik, diduga karena inefisiensi implementasi sektor kesehatan publik (Lantion et

al., 2023). Penelitian di Brazil juga menunjukkan bahwa program transfer tunai bersyarat mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan menekan angka putus sekolah, memperkuat proposisi bahwa belanja publik merupakan instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mendorong pembangunan manusia (Magalhães et al., 2024).

Ketidakkonsistenan hasil penelitian menegaskan perlunya kajian empiris dengan cakupan nasional untuk mengevaluasi pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan PDRB terhadap IPM secara komprehensif. Variasi hasil antar wilayah, perbedaan efektivitas alokasi anggaran, serta karakteristik ekonomi lokal menekankan pentingnya analisis yang mempertimbangkan konteks geografis dan kapasitas tata kelola daerah dalam memahami dinamika pembangunan manusia.

Berdasarkan fenomena empiris, teori ekonomi pembangunan, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, kajian mengenai pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap relevan untuk dilakukan. Periode penelitian 2020–2024 memberikan konteks baru karena perubahan orientasi anggaran pemerintah daerah selama pandemi COVID-19 menyebabkan variasi pencapaian pembangunan manusia antar provinsi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan PDRB terhadap IPM secara nasional pada 34 provinsi Indonesia, mempertimbangkan konteks desentralisasi fiskal dan perubahan prioritas belanja daerah selama pandemi. Pendekatan ini menggabungkan modal manusia dan kapasitas ekonomi daerah dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan variasi IPM, sehingga memberikan perspektif yang lebih holistik dibandingkan penelitian terdahulu yang sebagian besar bersifat regional atau fokus pada satu variabel saja. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas layanan publik dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan PDRB terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia. Tujuan tersebut diharapkan memberikan pemahaman empiris mengenai mekanisme pembangunan manusia dalam konteks desentralisasi fiskal, sekaligus menilai seberapa besar kontribusi alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kerangka konseptual penelitian ini mengasumsikan bahwa IPM dipengaruhi oleh tiga faktor utama: belanja pendidikan sebagai investasi dalam modal manusia untuk memperluas kapabilitas individu, belanja kesehatan sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas biologis dan produktivitas masyarakat, serta PDRB yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam menyediakan layanan publik. Ketiga faktor ini saling terkait, dan efektivitasnya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, efisiensi alokasi anggaran, serta karakteristik ekonomi dan sosial masing-masing daerah. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam, karena pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada satu variabel, tetapi pada kombinasi perbaikan terpadu di seluruh dimensi kualitas hidup.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, mendukung perbaikan layanan publik, dan mengurangi ketimpangan pembangunan manusia antarprovinsi. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan data panel sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, yang mencakup data tahunan 34 provinsi Indonesia selama periode 2020-2024. Data tersebut memungkinkan analisis hubungan antar variabel dilakukan secara menyeluruh, karena setiap provinsi memiliki karakteristik berbeda dan perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika yang perlu diamati secara bersamaan. Variabel yang dikumpulkan meliputi belanja pendidikan, belanja kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana tercantum dalam publikasi resmi nasional. Pemilihan data panel dilakukan untuk memperoleh estimasi yang lebih tepat terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Analisis dilakukan menggunakan Eviews13 dengan pendekatan pemilihan model regresi data panel untuk menentukan model yang paling sesuai. Proses dimulai dengan estimasi tiga model dasar, yakni *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow untuk menentukan preferensi antara CEM dan FEM, kemudian dilanjutkan dengan Uji Hausman jika FEM terpilih. Tujuan pengujian ini adalah memastikan model yang digunakan memberikan estimasi yang tidak bias dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model *Random Effects* dengan koreksi robust paling sesuai, sehingga model ini digunakan sebagai dasar analisis regresi penelitian.

Penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel *dependent*, sedangkan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto dijadikan variabel *independent*. IPM mencerminkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga menjadi indikator komprehensif untuk menilai kualitas pembangunan daerah. Belanja pendidikan diukur berdasarkan total realisasi anggaran pendidikan yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan. Sementara itu, belanja kesehatan menunjukkan alokasi anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto merepresentasikan kapasitas ekonomi daerah, yang berperan penting dalam kemampuan fiskal pemerintah serta peningkatan daya beli masyarakat. Susunan variabel ini sesuai dengan teori pembangunan manusia dan teori keuangan publik, yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai pilar utama pembangunan.

Model regresi data panel yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PED_{it} + \beta_2 KES_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + e_{it}$$

dimana IPM_{it} merupakan Indeks Pembangunan Manusia provinsi i pada tahun t . PED_{it} , KES_{it} dan $PDRB_{it}$ masing-masing adalah belanja pendidikan, belanja kesehatan dan produk domestik regional bruto, β_0 adalah konstanta β_1 β_2 β_3 adalah koefisien regresi dan e_{it} adalah *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan model *Random Effects* dengan koreksi robust, yang memberikan estimasi koefisien stabil untuk seluruh variabel penelitian. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki koefisien negatif dan signifikan, mengindikasikan hubungan terbalik antara peningkatan belanja pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, belanja kesehatan tidak menunjukkan

signifikansi statistik, sehingga pengaruhnya terhadap IPM dinyatakan tidak kuat. Sebaliknya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki koefisien positif dan signifikan, menegaskan peranannya yang konsisten dalam meningkatkan IPM.

Hasil estimasi ini dijabarkan dalam Tabel 1, yang menyajikan koefisien, standar error, t-statistik, dan probabilitas tanpa menampilkan proses analisis atau tahapan pemilihan model. Tabel ini menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya, baik secara parsial maupun simultan..

Tabel 1. Hasil Estimasi Model *Random Effects* dengan *Robust Standard Errors*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob.
C	99,6173	16,2950	6,1134	0,0036
LogPED	-2,0927	0,7595	-2,7555	0,0511
LogKES	-0,3402	0,3927	-0,8662	0,4353
LogPDRB	3,2829	0,3148	10,4296	0,0005

Sumber : Data diolah penulis 2025

Hasil ini menunjukkan variasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap IPM. Belanja pendidikan memberikan efek negatif, menandakan adanya ketidakefektifan alokasi anggaran, sementara belanja kesehatan tidak signifikan karena sebagian besar anggaran difokuskan pada kebutuhan rutin dan darurat. PDRB memberikan pengaruh positif yang kuat, memperlihatkan bahwa kapasitas ekonomi daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Temuan ini menjadi dasar bagi analisis lebih mendalam pada bagian pembahasan parsial masing-masing variabel.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki koefisien negatif sebesar $-2,0927$ dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%, mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak secara otomatis mendorong kenaikan IPM di tingkat provinsi. Temuan ini menandakan adanya ketidakefektifan dalam struktur belanja pendidikan selama periode penelitian.

Secara teoritis, dalam teori modal manusia, investasi pendidikan seharusnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan akademik. Namun, bukti empiris penelitian ini menunjukkan perbedaan akibat pola alokasi anggaran yang masih terfokus pada komponen administratif dan non-instruksional, bukan pada kegiatan yang langsung meningkatkan kualitas pembelajaran. Fenomena ini semakin terlihat selama pandemi, ketika sebagian anggaran dialihkan untuk kebutuhan operasional non-instruksional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Siregar et al., 2023) di Provinsi Aceh, yang menemukan belanja pendidikan memiliki koefisien negatif meskipun tidak signifikan terhadap IPM kabupaten/kota. Di sisi lain, studi di Jawa Barat oleh (C. L. Pratama & Mandai, 2023) menunjukkan belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian (Banase & Purwono, 2024) di Nusa Tenggara Timur serta (Firmansyah & Wasil, 2024) di Indonesia Timur juga menemukan pengaruh positif belanja pendidikan terhadap IPM. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa besaran anggaran saja tidak menjamin peningkatan kualitas pendidikan, melainkan efektivitas alokasi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pola alokasi belanja yang terfokus pada komponen non-instruksional menunjukkan adanya tantangan struktural dalam tata kelola daerah, yang membatasi kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun keterampilan hidup (UNDP, 2022, 2024). Oleh karena itu, pengeluaran pendidikan memegang peran signifikan dalam mendorong variasi IPM antar provinsi, asalkan diarahkan pada peningkatan kualitas proses belajar. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran, tetapi juga pada fokus kebijakan dan efektivitas layanan publik.

Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja kesehatan memiliki koefisien negatif sebesar $-0,3402$ dan tidak signifikan secara statistik, yang berarti peningkatan anggaran kesehatan tidak memberikan pengaruh berarti terhadap IPM selama periode penelitian. Kondisi ini muncul karena sebagian besar anggaran kesehatan terserap untuk penanganan pandemi dan pembiayaan rutin yang tidak secara langsung meningkatkan kualitas layanan dasar.

Menurut (Todaro & Smith, 2020), kesehatan merupakan komponen fundamental pembangunan manusia, namun manfaatnya baru optimal jika investasi diarahkan pada program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, struktur pengeluaran cenderung fokus pada kebutuhan jangka pendek, sehingga tidak meningkatkan mutu fasilitas maupun aksesibilitas layanan kesehatan secara signifikan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan variasi efektivitas belanja kesehatan antar daerah. Misalnya, (Siregar et al., 2023) di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, meskipun belanja pendidikan dan belanja sosial tidak signifikan. Studi di Jawa Timur oleh (Amelia & Arisetyawan, 2024) juga menegaskan bahwa alokasi belanja kesehatan yang terarah dapat meningkatkan IPM secara signifikan. Di sisi lain, penelitian (Banase & Purwono, 2024) di Nusa Tenggara Timur serta (Firmansyah & Wasil, 2024) di Indonesia Timur menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Perbedaan hasil ini menekankan kompleksitas implementasi program kesehatan di tingkat daerah, yang sangat dipengaruhi tata kelola dan prioritas pengeluaran.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa koefisien yang tidak signifikan mencerminkan perlunya perumusan ulang kebijakan agar alokasi belanja kesehatan lebih produktif dan tepat sasaran. Kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat ketika layanan dasar tersedia secara merata, terjangkau, dan responsif terhadap risiko penyakit (UNDP, 2022). Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas belanja kesehatan tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi pada strategi alokasi dan tata kelola yang baik, sehingga kontribusi terhadap pembangunan manusia dapat terwujud secara nyata (UNDP, 2024).

Pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB memiliki koefisien positif sebesar $3,2829$ dan signifikan secara statistik, yang menegaskan bahwa kapasitas ekonomi daerah menjadi faktor penentu dalam peningkatan IPM. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan publik.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memperluas kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pendekatan teori pertumbuhan endogen juga menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi menciptakan peluang untuk memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup

masyarakat. Provinsi dengan PDRB tinggi seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur secara konsisten menunjukkan IPM yang lebih stabil, sehingga data ini memperkuat argumen bahwa kapasitas ekonomi merupakan pendorong utama pembangunan manusia.

Bukti empiris sebelumnya mendukung temuan ini. (C. L. Pratama & Sumiyarti, 2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, memperkuat kesimpulan bahwa kekuatan ekonomi berdampak lebih langsung dibandingkan belanja publik yang strukturnya tidak selalu efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi dasar provinsi, yang menyediakan sumber daya untuk meningkatkan layanan publik dan program sosial.

Temuan ini menegaskan pentingnya kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan efektivitas alokasi belanja publik dalam mendorong peningkatan IPM. PDRB yang kuat memberikan fondasi yang lebih stabil bagi pembangunan manusia, sedangkan belanja publik yang tidak efektif hanya memberikan dampak parsial terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara Simultan

Hasil estimasi simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan PDRB secara bersama-sama memengaruhi variasi IPM selama periode penelitian. Pola simultan ini mengindikasikan bahwa kombinasi kapasitas fiskal, alokasi belanja, dan kekuatan ekonomi membentuk kualitas hidup masyarakat secara lebih komprehensif dibandingkan pengaruh parsial tiap variable.

Dalam analisis ini, PDRB tetap menjadi variabel paling dominan dan signifikan, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh struktural yang lebih kuat terhadap IPM dibandingkan belanja publik. Belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang tidak sepenuhnya efektif menegaskan bahwa peningkatan anggaran saja tidak menjamin *outcome* yang lebih baik tanpa orientasi kebijakan yang tepat dan tata kelola yang transparan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hanya sebagian provinsi yang mampu memanfaatkan belanja publik secara efisien untuk meningkatkan IPM. Analisis simultan memperlihatkan bahwa pembangunan manusia membutuhkan kombinasi yang tepat antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan efektivitas alokasi anggaran publik. Dengan demikian, strategi pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan tata kelola belanja publik akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil ini memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, dengan fokus pada produktivitas belanja publik dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaan sumber daya dan struktur kebijakan yang tepat sasaran.

SIMPULAN

Penelitian ini menyajikan ringkasan temuan mengenai pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Analisis simultan menunjukkan bahwa kombinasi belanja fiskal dan kapasitas ekonomi regional memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, menegaskan bahwa investasi dalam modal manusia yang didukung fondasi ekonomi menjadi penentu utama pembangunan daerah. Namun, analisis parsial mengungkap ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal dan hasil pembangunan. Belanja Pendidikan ternyata memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap IPM, yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih terfokus pada belanja rutin dan belum berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara itu, Belanja Kesehatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program kesehatan masih terkendala tata kelola dan ketepatan alokasi, sehingga dampaknya terhadap dimensi kesehatan IPM tetap terbatas. Di sisi lain, PDRB menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, menegaskan bahwa kekuatan ekonomi regional memainkan peran krusial dalam meningkatkan IPM.

Berdasarkan temuan tersebut, arah kebijakan fiskal perlu direorientasikan. Pemerintah daerah disarankan untuk beralih dari sekadar memenuhi kuantitas anggaran menuju meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja pendidikan serta kesehatan. Penekanan harus diberikan pada kemampuan dana publik untuk mentransformasikan anggaran menjadi peningkatan nyata pada indikator kualitas pendidikan dan kesehatan, bukan hanya pemenuhan angka belanja. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memasukkan variabel moderasi atau variabel belanja publik lain, seperti belanja perlindungan sosial, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas belanja publik terhadap IPM. Studi oleh (Diana & Yustie, 2025) pada program bantuan sosial di Papua menunjukkan bahwa tidak semua komponen belanja sosial berdampak seragam; misalnya, KIP dan KIS justru berhubungan negatif dengan indikator pembangunan, sementara BPNT menunjukkan pengaruh positif. Temuan ini menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap variabel moderasi, seperti kualitas tata kelola dan transparansi anggaran, untuk mengungkap hambatan struktural dalam penerapan belanja publik yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan manusia di daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran belanja publik, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas alokasi dan kekuatan ekonomi regional. Temuan mengenai pengaruh negatif Belanja Pendidikan, tidak signifikan Belanja Kesehatan, serta pengaruh positif PDRB menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan fiskal dan perbaikan tata kelola. Penekanan pada efisiensi dan kualitas belanja publik, didukung transparansi dan tata kelola yang baik, menjadi kunci untuk meningkatkan IPM secara nyata. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memaksimalkan dampak investasi publik terhadap pembangunan manusia, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor struktural yang memengaruhi efektivitas belanja publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Arisetyawan, K. (2024). Belanja publik sektor sosial terhadap IPM serta PDRB di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 68–79. <https://independentjournalofeconomics.com>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Banase, M. A. D. D., & Purwono, R. (2024). The Influence of Government Expenditure on the Human Development Index in NTT Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(1), 109–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57397>
- Diana, I. N., & Yustie, R. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial (BPNT, KIP, KIS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2018–2022. *Jurnal Simki Economic*, 8(2), 519–527. <https://jiped.org/index.php/JSE>
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1).

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>

- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). The Influence of Education Expenditure, Health Expenditure and Social Assistance Expenditure on Human Development Index in NTB Province in 2013–2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <https://doi.org/http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Hidayat, W. N. R., & Perwithosuci, W. (2024). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.18551>
- Kurniawan, I., & Murtala. (2021). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 1–8. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Lantion, D. A. S., Musngi, G. V., & Cabauatan, R. R. (2023). Assessing the Relationship of Human Development Index (HDI) and Government Expenditure on Health and Education in Selected ASEAN Countries. *International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)*, 4(6), 13–24.
- Magalhães, J., Ziebold, C., Evans-Lacko, S., Matijasevich, A., & Silvestre Paula, C. (2024). Health, economic and social impacts of the Brazilian cash transfer program on the lives of its beneficiaries: A scoping review. *BMC Public Health*, 24, 2818. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-024-20046-2>
- Nadhi, I. M. A., Hudang, A. K., & Renggo, Y. R. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Bagi Kemiskinan di Sumba. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 25(1), 37–47. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.25194>.
- Amelia, R., & Arisetyawan, K. (2024). Belanja publik sektor sosial terhadap IPM serta PDRB di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 68–79. <https://independentjournalofeconomics.com>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Banase, M. A. D. D., & Purwono, R. (2024). The Influence of Government Expenditure on the Human Development Index in NTT Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(1), 109–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57397>
- Diana, I. N., & Yustie, R. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial (BPNT, KIP, KIS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2018–2022. *Jurnal Simki Economic*, 8(2), 519–527. <https://jipied.org/index.php/JSE>
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). The Influence of Education Expenditure, Health Expenditure and Social Assistance Expenditure on Human Development Index in NTB Province in 2013–2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <https://doi.org/http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Hidayat, W. N. R., & Perwithosuci, W. (2024). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah

- Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*2, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.18551>
- Kurniawan, I., & Murtala. (2021). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 1–8. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Lantion, D. A. S., Musngi, G. V., & Cabauatan, R. R. (2023). Assessing the Relationship of Human Development Index (HDI) and Government Expenditure on Health and Education in Selected ASEAN Countries. *International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)*, 4(6), 13–24.
- Magalhães, J., Ziebold, C., Evans-Lacko, S., Matijasevich, A., & Silvestre Paula, C. (2024). Health, economic and social impacts of the Brazilian cash transfer program on the lives of its beneficiaries: A scoping review. *BMC Public Health*, 24, 2818. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-024-20046-2>
- Nadhi, I. M. A., Hudang, A. K., & Renggo, Y. R. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Bagi Kemiskinan di Sumba. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 25(1), 37–47. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.25194>
- Pratama, C. L., & Mandai, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 241–248. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.15352>
- Pratama, C. L., & Sumiyarti. (2023). Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. *Media Ekonomi*, 31(2), 181–194. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i2.18510>
- Pratama, M. I., & Nursari, A. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah (JESYA)*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesy.v8i1.1782>
- Siregar, Z., Erlina, & Sirojuzilam. (2023). Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(1), 9–18. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- UNDP. (2022). *The 2021/2022 Human Development Report*.
- UNDP. (2024). *Global Progress Report on Sustainable Development Goal 16 Indicators: At the Crossroads Breakdown or Breakthrough for Peace, Justice and Strong Institutions*.